

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

( LKIP )

PEMERINTAH KECAMATAN Ciranjang  
TAHUN 2023



## KECAMATAN CIRANJANG

KABUPATEN CIANJUR

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-nya. Laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciranjang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan.

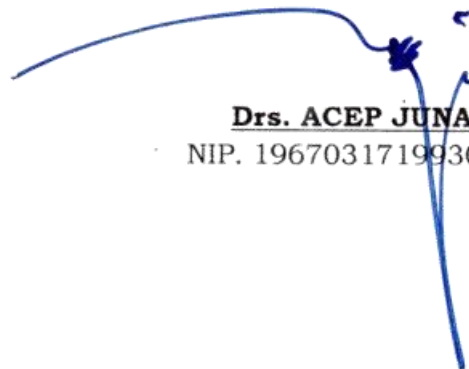
Sebagaimana Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomo 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara Review atas laporan kinerja instansi pemerintah yang harus dibuat oleh Perangkat Daerah.

Penyusunan dilakukan dengan analisa dan memaparkan capaian kinerja akuntabilitas keuangan mengacu pada penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Ciranjang Tahun 2023 dengan melaksanakan analisis terhadap realisasi kegiatan dan laporan realisasi anggaran tahun 2023.

Semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Ciranjang, Februari 2024

CAMAT Ciranjang



**Drs. ACEP JUNAEDI**  
NIP. 196703171993011003

## **IKHTISAR EKSEKKUTIF**

Laporan Kinerja Kecamatan Ciranjang tahun 2023 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 81 tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi.

LKIP ini juga merupakan capaian kinerja (*Performnace Result*) yang sesuai dengan rencana kerja (*Performance Planning*) Kecamatan Ciranjang Tahun 2023.

Berdasarkan penilaian sendirian (*Self assessment*) atas realisasi pelaksanaan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, menunjukkan bahwa rata-rata nilai capaian kinerja dari 6 Program yang dilaksanakan oleh Kecamatan adalah 100% sehingga dapat dikategorikan baik. Sedangkan untuk capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 2.200.621.149,00 dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 2.303.287.400,00 itu artinya penyerapan anggaran sebesar 95,54%.

Agar dapat mengoptimalkan kinerja dalam rangka mencapai sasaran yang ditetapkan dalam renstra PD diperlukan beberapa langkah yang dapat mendongkrak kinerja PD agar maksimal untuk itu Kecamatan Ciranjang telah melakukan beberapa hal agar sasaran dan tujuan dapat tercapai yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi rutin dengan PORKOPINCAM PD yang ada di Kecamatan yang dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan di Wilayah Kecamatan Ciranjang dapat berjalan tertib dan kondusif;
2. Melaksanakan monitoring Program-program yang dilaksanakan di Desa secara rutin;
3. Melaksanakan koordinasi rutin dengan sekmat, kasi, kasubag dan staf untuk mensukseskan program dan kegiatan yang dilaksanakan;

4. Melaksanakan evaluasi rutin terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh PD Kecamatan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari peran dan fungsi ASN itu sendiri sehingga kualitas dan kompetensi ASN perlu ditingkatkan terus agar terciptanya ASN yang profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik di tingkat Kecamatan Ciranjang.

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Bagan.....	vi
<b>BAB. I</b> <b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Gambaran Umum Organisasi.....	2
D. Struktur Organisasi Kecamatan.....	4
<b>BAB. II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Visi dan Misi.....	5
B. Tujuan .....	6
C. Sasaran.....	6
D. Program.....	7
E. Perjanjian Kinerja.....	7
F. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	8
<b>BAB. III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian IKU.....	11
B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja .....	14
C. Realisasi Anggaran.....	20
D. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	21
<b>BAB. IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	22

### LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

## **BAB. I**

### **P E N D A H U L U A N**

#### **A. Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Ciranjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Pengukuran indikator kinerja yang dipergunakan dalam pencapaian kinerja dapat diketahui melalui indikator input (masukan), output (keluaran), outcomes (hasil) dan Benefit (manfaat). Sedangkan untuk mengetahui tahapan pengukuran evaluasi kinerja dapat dilihat mulai dari capaian pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan, nilai capaian kerja pelaksanaan program samapai dengan nilai capaian kebijaksanaan. Tahapan evaluasi kinerja yang akan dijelaskan menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan pembangunan, pengarahan, pengawasan dan pengendalian yang ada di Kecamatan Ciranjang berjalan baik sesuai dengan tujuan dan sasaran.

#### **B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan dokumen laporan Kinerja untuk menyajikan pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja.

Melalui LKIP Kecamatan dapat mengukur tingkat keberhasilan kinerja dari berbagai factor baik itu dari sisi perencanaan, pelaksanaan dan

pelaporan sehingga dapat dijadikan tolak ukur dalam mencapai target kinerja yang kemudian dijadikan sebagai perbaikan kinerja untuk meningkatkan kinerja Kecamatan Ciranjang ditahun berikutnya.

### C. Gambaran Umum Organisasi

Kecamatan Ciranjang adalah salah satu dari tiga puluh dua kecamatan yang ada di Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat.

Secara geografis kecamatan Ciranjang terletak di bagian utara kabupaten Cianjur dengan Jarak ke Ibu Kota Kabupaten 17 Km, Jarak sekitar 83 Km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Barat (Bandung) dan 100 Km dari Ibu Kota Negara (Jakarta) dan terletak di Antara 6°21"-7°25" Lintang selatan dan 106°42"-107°25" Bujur timur, dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Mande, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sukaluyu sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Bojongpicung, sebelah timur berbatasan dengan wilayah Kecamatan Haurwangi. Berdasarkan letaknya Kecamatan Ciranjang sangat strategis dan berada pada jalur protocol regional Propinsi jawa barat dan Ibu kota Negara.

Secara administratif Kecamatan Ciranjang terdiri dari 9 (Sembilan) Desa yaitu sebagai berikut :

No	Nama Kelurahan / Desa	Nama Kepala Lurah / Kepala Desa
1	Ciranjang	H. DEDEN EFENDI.SH
2	CIBIUK	DAHLAN RIFA'I
3	SINDANGJAYA	DJUANDI
4	KERTAJAYA	SUNANDAR
5	GUNUNGSARI	AJI CAHYA

6	SINDANGSARI	RINA HADI SUWARTIKA
7	KARANGWANGI	NANA SURYADANA
8	NANGGALAMEKAR	HILMAN.S.KOM
9	MEKARGALIH	TARYAT DIBRATA, S.Pd.MM

Dengan jumlah RW dan RT dari tiap Kelurahan/Desa dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

### **Jumlah RW/RT se- Kecamatan Kecamatan Ciranjang**

**Tahun 2023**

<b>NO.</b>	<b>DESA</b>	<b>RW</b>	<b>RT</b>
1	Ciranjang	18	70
2	CIBIUK	14	38
3	NANGGALAMEKAR	13	38
4	SINDANGJAYA	8	34
5	SINDANGSARI	7	31
6	GUNUNGSARI	9	35
7	KERTAJAYA	9	39
8	KARANGWANGI	10	25
9	MEKARGALIH	10	33
	<b>Jumlah</b>	<b>98</b>	<b>343</b>

Sumber : laporan kasi ppm bln desember 2023



## D. Struktur Organisasi Kecamatan Ciranjang

Berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 tahun 2016, struktur PD Kecamatan terdiri dari :

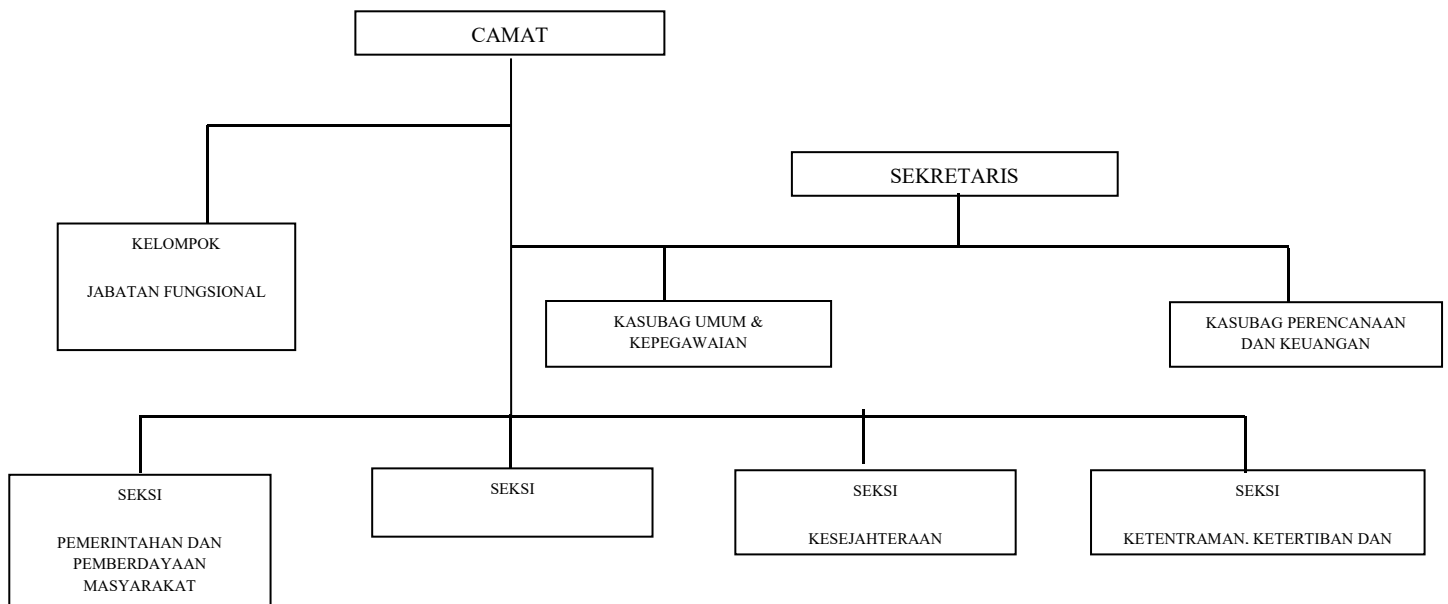
*Lampiran XXVII Peraturan Bupati Cianjur*

*Nomor : 50 tahun 2016*

*Tentang : Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas*

*Dan fungsi, serta tata kerja perangkat Daerah*

*Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur*



## **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan**

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesejahteraan antara apa yang ingin di capai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan tersebut.

Permasalahan-permasalahan pelayanan perangkat daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya merupakan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan pemerintah untuk bekerjanya fungsi-fungsi yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan antara kinerja pembangunan yang di capai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut ditakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Perumusan masalah pokok merupakan masalah yang bersifat mikro bagi Daerah, masalah pokok di pecahkan melalui rumusan misi, tujuan dan sasaran. Perumusan masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah pokok yang lebih spesifik. Pemecahan masalah melalui strategi. Perumusan akar masalah dengan cara mencari beberapa penyebab dari masalah yang lebih rinci. Pemecahan akar masalah melalui arah kebijakan atau kebijakan umum.

Identifikasi rumusan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah didasarkan pada hasil evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah terhadap capaian kinerja selama 5 (lima) tahun terakhir yang disajikan di bab 2 dokumen ini, dan kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan sebagai berikut :

Tabel 1.1

**Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran  
Pembangunan Daerah**

<b>Masalah Pokok</b>	<b>Masalah</b>	<b>Akar Masalah</b>
Belum optimalnya kinerja pemerintahan di Kecamatan	Penyelenggaraan pemerintahan yang belum optimal	Lemahnya integritas dan profesionalitas aparatur
		Kurangnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
		Kurang aktifnya lembaga kemasyarakatan yang telah terbentuk
		Keterbatasan kewenangan dan anggaran yang di limpahkan/diberikan
	Pelayanan Publik yang belum optimal	Birokrasi yang belum efektif dan efisien
		Pelayanan perijinan dan non perizinan yang belum memenuhi standar
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan dan non perizinan
		Keterbatasan pelaksana teknis terhadap layanan

		Pengawasan perzinan yng belum optimal
--	--	---------------------------------------

Dari tabel tersebut di atas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang terjadi sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pemerintah yang belum optimal

Tata kelola pemerintah yang belum sepenuhnya dapat mencegah distorsi produk-produk kebijakan publik, karena belum adanya proses yang benar-benar transparan dan akuntable baik dari segi penyusunan, pelaksanaan maupun monitoring dan evaluasinya. Hal tersebut mengakibatkan banyak masyakat berpendapat bahea birokrasi pemerintahan tidak efisien, efektif dan akuntable, serta pelayanan publik belum optimal.

b. Pelayanan publik yang belum optimal

Penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan merupakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kurangnya komunikasi dalam memberikan informasi berdampak kepada perbedaan persepsi (pandangan) dalam pelaksanaan pelayanan publik. Tidak adanya uraian prosedur berikut contoh rancangan produknya juga mempengaruhi SP dan SOP yang diterbitkan oleh kecamatan. Tidak adanya penyelenggaraan dalam mengimplementasi peraturan mengakibatkan banyak ditemui tumpang tindih pekerjaan.

## **BAB. II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

Penyusunan Perencanaan Kinerja Kecamatan merupakan suatu upaya untuk mengarahkan dimensi kebijakan pemerintahan dan pembangunan, baik di Pemerintahan Kecamatan sendiri maupun secara lintas sektoral. Perencanaan kinerja Kecamatan tersebut tetap mengacu pada perencanaan kinerja Kabupaten sehingga dalam pengelolaan dan pelayanan Kepada Masyarakat betul-betul mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur tahun 2021-2026 yang telah dibuat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 yang merupakan pedoman dalam pembangunan di kabupaten Cianjur selama tahun 2021-2026

#### **A. VISI DAN MISI**

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih seharusnya menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban.

Berdasarkan pengetian diatas, maka Visi Kabupaten Cianjur yaitu **Cianjur Manjur Berahklak Mulia** yang didukung dengan beberapa misi yaitu :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, produktif, bertakwa dan berahklak mulia menyambut *era society 5.0* ;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal, mandiri dan berdaya saing tinggi sesuai dengan tuntutan era industri 4.0;

3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk mengurangi kesenjangan serta mendukung peningkatan dan pemerataan pembangunan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi;
4. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam untuk menjamin keseimbangan alam dan kelangsungan lingkungan hidup;
5. Pemantapan reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju *era governance 3.0*.

## **B. TUJUAN**

### Tujuan Jangka Menengah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kecamatan Ciranjang Kabupaten Cianjur berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026, dengan berpedoman pada Visi Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 yaitu “Cianjur Manjur Berakhlak Mulia”

Adapun misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-5 (lima) Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2021-2026 : Pemantapan Reformasi dan transformasi birokrasi pemerintahan untuk menjamin terciptanya sistem pelayanan publik yang semakin baik, profesional, efektif dan efisien serta adaptif menuju *era governance 3.0* dengan tujuan : Terwujudnya transformasi reformasi birokrasi yang berkualitas.

## **C. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan adalah terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal. Sasaran strategis yang akan dicapai adalah sebagai berikut :


Tabel 1 sasaran Strategis Jangka Menengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tahun					Kondisi Akhir
					Tahun I	Tahun II	Tahun III	Tahun IV	Tahun V	
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntable	SKM kepada OPD terkait	Point	81,73	82,15	82,85	83,55	84,25	84,95	84,95
		SKM kepada masyarakat	Point	81,73	82,15	82,65	83,15	83,65	84,15	84,15

#### D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Ciranjang berkomitmen menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen penetapan kinerja di bawah ini :

## Tabel 2. 3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

 **PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN CIRANJANG**  
Jalan Raya Ciranjang Bandung No : 204 Tlp (0263) 322709 Ciranjang  
e-mail : camatciranjang@cianjurkab.go.id

---

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**NAMA : Drs. ACEP JUNAEDI**  
**JABATAN : CAMAT CIRANJANG**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

**NAMA : H.HERMAN SUHERMAN. ST,MAP**  
**JABATAN : BUPATI CIANJUR**


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**Cianjur, 13 November 2023**

**Pihak Kedua,**

  
**H.HERMAN SUHERMAN. ST,MAP**

**Pihak Pertama,**

  
**Drs. ACEP JUNAEDI**  
**NIP. 196703171993011003**





**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIRANJANG**

Jalan Raya Ciranjang Bandung No : 204 Tlp (0263) 322709 Ciranjang  
e-mail : camatciranjang@cianjurkab.go.id

**LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023  
CAMAT CIRANJANG KABUPATEN CIANJUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang transparan dan akuntabel	1. SKM kepada OPD terkait	82,85
		2. SKM kepada masyarakat	82,65

NO	PROGRAM		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Program Penunjang Pemerintahan Kabupaten/Kota	Urusan Daerah	Rp. 2.081.449.300	Sumber Dana APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Rp. 72.870.600	Sumber Dana APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		Rp. 30.000.000	Sumber Dana APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum		Rp. 13.575.000	Sumber Dana APBD
5	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		Rp. 60.525.000	Sumber Dana APBD
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Rp. 34.367.500	Sumber Dana APBD
<b>Jumlah Anggaran</b>			<b>Rp. 2.292.787.400</b>	

Terbilang : Dua Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ratus Rupiah

Pihak Kedua,  
  
**H. HIRMAN SUHERMAN. ST, MAP**

Cianjur, 13 November 2023  
Pihak Pertama,

  
**Drs. ACEP JUNAEDI**  
**NIP.196703171993011003**

## **E. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023**

Struktur APBD Kecamatan Ciranjang Tahun 2023 terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut :

### **Ringkasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kecamatan Ciranjang Tahun Anggarna 2023**

<b>NO</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>%</b>
1	Belanja	2.303.287.400,00	100 %
2	Belanja Pegawai	1.898.632.200,00	82.43 %
3	Belanja Barang dan Jasa	396.550.200,00	16.78%
4	Belanja Modal	18.105.000	0,97%

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA PD) Kecamatan Ciranjang Tahun 2023

Perbandingan rencana anggaran belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal dengan anggaran adalah 6:1

Anggaran Belanja Langsung tahun 2023 Kecamatan Ciranjang melaksanakan 5 Program wajib dan 1 program Non urusan.

Alokasi anggaran belanja langsung yang direncanakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran kinerja kecamatan telah ditetapkan targetnya dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

**Tabel 3 Anggaran Belanja Langsung per Sasaran Strategis**

**Kecamatan Ciranjang TA 2023**

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	<b>Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat dan pelayanan kepada OPD yang optimal</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait. Persentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat</b>	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.091.949.300	1.989.283.049	<b>95,09</b>
2			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72.870.600	72.870.600	100
3			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000	100
4			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.575.000	13.575.000	100
5			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.525.000	60.525.000	100
6			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.367.500	34.367.500	100
<b>Total Anggaran</b>				<b>2.303.287.400</b>	<b>2.200.621.149</b>	<b>95,54</b>

## BAB. III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian IKU

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kecamatan Ciranjang dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kecamatan Ciranjang dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Ciranjang Tahun 2023 dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023**

No	Kinerja Utama	IKU	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian (%)	Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir RPJMD	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntable	SKM Kepada OPD terkait	Point	83,02	82,85	83,30	83,02	84,95	Tercapai
		SKM Kepada Masyarakat	Point	83,02	82,65	83,30	83,02	84,15	

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa target kinerja IKU Kecamatan Ciranjang sudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, adapun rincian kegiatan dalam indicator kinerja tersebut sebagai berikut :

### **1. Pemenuhan Pelayanan kepada Perangkat Daerah terkait**

Untuk indikator kinerja pemenuhan pelayanan kepada OPD, Kecamatan Ciranjang memiliki 3 kegiatan yaitu :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan.

Kegiatan ini berfokus pada sub kegiatan koordinasi sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. Subkegiatan ini meliputi kegiatan musrenbang Tingkat Kecamatan merupakan agenda tahunan yang dimaksudkan untuk mengakomodir prioritas pembangunan hasil dari Musrenbangdes yang kemudian prioritas ini akan dilaporkan ke BAPPRIDA Kabupaten Cianjur untuk dibawa ke Forum OPD.

- b. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Kegiatan ini merupakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan dilaksanakan oleh kecamatan secara berkala per empat bulan sekali dengan tujuan untuk memonitoring pelaksanaan jalannya pemerintahan desa dan kelancaran program pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari APBDes yang diharapkan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Desa dapat mengadvokasi semua kepentingan masyarakat desa dengan tidak mengabaikan rencana strategis pemerintah daerah yang sudah ditetapkan dalam RPJMD kabupaten/kota .

- c. Pelaksana Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat

Kegiatan ini memiliki sub kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan yaitu bertumpu pada Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Merupakan kegiatan untuk memonitoring pelaksanaan pemungutan PBB di masyarakat oleh pihak kolektor. Kegiatan ini juga merupakan evaluasi terhadap target PBB yang telah ditentukan kepada setiap Desa di Kecamatan Ciranjang. Kegiatan ini dilaksanakan minimal dua kali setahun dan laporan dari pelaksanaan kegiatan ini disajikan dalam bentuk dokumen laporan ke Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD).

## **2. Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat**

Untuk indikator Pemenuhan Pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Ciranjang mempunyai kegiatan sebagai berikut :

### **a. Koordinasi Upanya penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban umum**

Kegiatan ini merupakan kegiatan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kondusifitas di masyarakat.

Hubungan harmonisasi tokoh Agama dan tokoh Masyarakat, saat ini penting dan krusial, apalagi para tokoh ini corong masyarakat, dalam artian Pemerintah sebagai kepanjangan tangan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, perlu dukungan para tokoh.

Pentingnya hubungan dengan para tokoh, karena tokoh bisa menyampaikan program Pemerintah, hingga tingkat masyarakat paling bawah, serta mewakili pemerintah dalam menyelesaikan konflik secara persuasif dan kearifan lokal.

Untuk itulah pentingnya peran para tokoh membantu pemerintah, untuk meredam dan menghilangkan terjadinya konflik ditengah masyarakat dan menyelesaikan persoalan melalui pendekatan Agama dan musyawarah.

### **b. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**

Kegiatan ini terdapat sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan yaitu pada Kegiatan Tim Penggerak PKK Kecamatan dan Kelurahan Merupakan kegiatan yang dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan serta PKK sebagai bagian dari pembangunan karakter wanita yang bisa berperan sebagai mitra kerja pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan secara tatap muka dengan TP PKK Desa sebulan sekali.

c. Koordinasi Pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum

Kegiatan ini terdapat sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau intenasi vertikal yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum seperti Kegiatan Peningkatan Operasi Persampahan dalam rangka menunjang kegiatan K5. Kegiatan ini bertujuan agar kebersihan lingkungan khususnya tempat-tempat strategis di Kecamatan Ciranjang bisa terjaga kebersihannya. Sehingga keindahan lingkungan bisa terjaga dan memberi manfaat bagi masyarakat sekitarnya.

## **B. Pengukuran Dan Analisis Kinerja**

Capaian kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini merupakan capaian kinerja tahun kedua yang mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2023 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sasaran Kecamatan Ciranjang yaitu : Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal adapun Kinerja Kantor Kecamatan Ciranjang terdiri dari 2 indikator, dengan fokus pada pelayanan kepada OPD terkait dan pelayanan kepada masyarakat.



### **Deskripsi sasaran :**

Pada Indikator Kinerja Pemenuhan Pelayanan kepada OPD terkait kecamatan Ciranjang melaksanakan 3 Kegiatan yaitu :

#### 1. Musrenbang Kecamatan Ciranjang

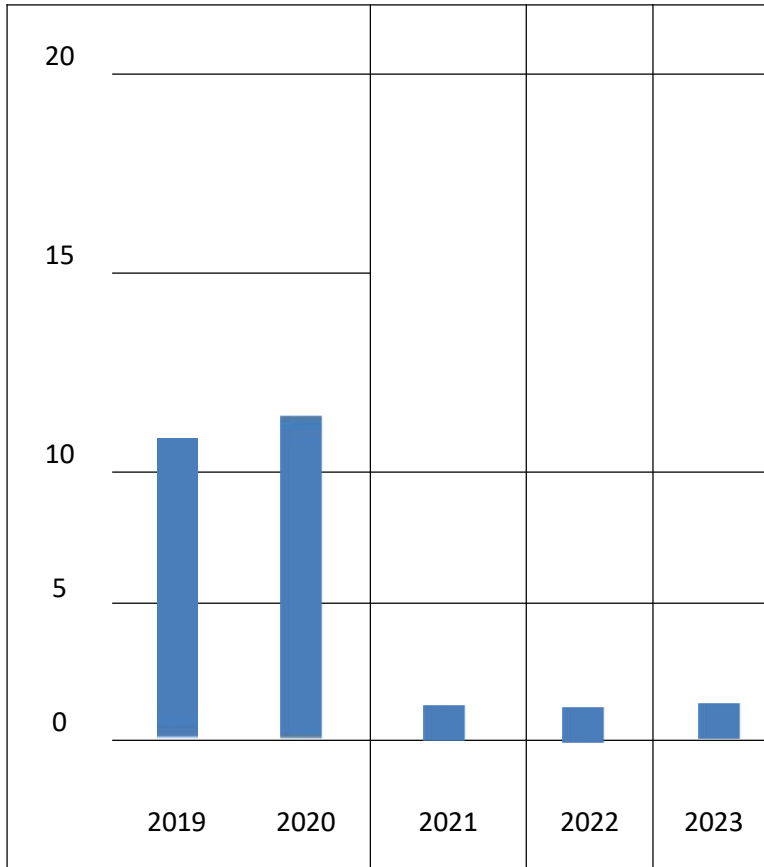
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Musrenbang Tk. Kecamatan	1 dokumen	1 dokumen	100%

Pada tahun 2023 Kecamatan Ciranjang menerima 9 usulan hasil Musrenbangdes yang kemudian diusulkan ke Bapprida menjadi 5 prioritas kecamatan.

Dari 5 usulan tersebut realisasi hasil musrenbang tk. Kecamatan Ciranjang hanya 1 usulan yang diakomodir oleh OPD terkait atau sebesar 20 %. Realisasi usulan musrenbang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebanyak 0.5 %. Peningkatan tersebut didukung dikarenakan adanya percepatan perbaikan infrastruktur menuju Kawasan wisata yang ada di Kecamatan Ciranjang.

### Grapik 1

Perkembangan realisasi Persentase usulan Musrenbang Tk. Kecamatan

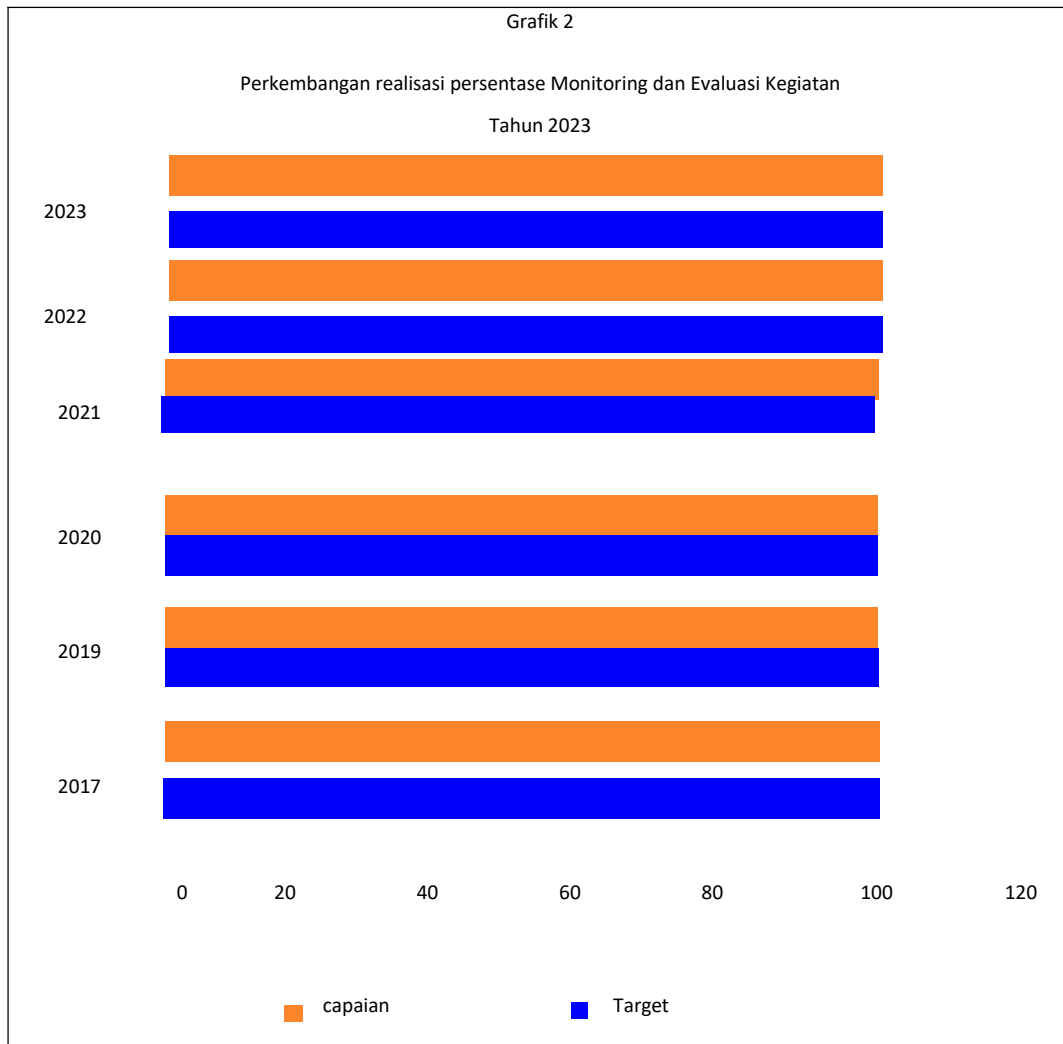


#### 1. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan

Kegiatan monitoring merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh Kecamatan Ciranjang dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Pada tahun 2023 realisasi untuk kegiatan monitoring mencapai 100%. Realisasi

persentase tersebut dapat memenuhi target dikarenakan Kecamatan Ciranjang dapat melaksanakan kegiatan Monev ke 9 Desa.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan	1 dokumen	1 dokumen	100%



## 2. Monitoring dan Evaluasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Jumlah penerimaan PBB adalah besaran pajak bumi dan bangunan yang dapat di tagih dan dapat disetorkan sebagai pendapatan daerah, realisasi penerimaan PBB tahun 2023 adalah Rp. 655.978.366,00 dari target Rp.1.221.319.325,00 dengan capaian 54,10 % ukuran keberhasilan dari indikator sasaran ini adalah : realisasi PBB Kecamatan Ciranjang pada akhir tahun 2023 adalah 54,10 %

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%	Interpensi capaian Iku
1	Jumlah penerimaan PBB	1.221.319.325	655.978.366	54,10	
Rata-rata				54,10 %	
Kategori				Rendah	

Dalam Pemerintahan pelayanan publik menjamin keberlangsungan administrasi negara yang melibatkan kebijakan pelayanan dan pengelolaan sumberdaya yang berasal dari dan untuk kepentingan publik. Kecamatan adalah salahsatu representasi pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat oleh karena itu Pelayanan publik di Kecamatan merupakan ujung tombak bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat.

Di Tahun 2023 untuk pemenuhan target pelayanan publik kepada masyarakat Kecamatan Ciranjang didukung oleh 3 kegiatan berikut :

### 1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas pokok merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi operasional ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan pelaksanaan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pemantauan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
2. Penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
4. Pelaksanaan kegiatan operasi pengendalian terhadap pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
5. Pelaksanaan penanganan pengaduan adanya pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
6. Pelaksanaan pengawalan pejabat dan atau orang penting dan pengamanan tempat-tempat penting rumah dinas pejabat serta acara-acara resmi;
7. Pelaksanaan patroli rutin dalam pengendalian keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di seluruh daerah;
8. Pelaksanaan penanganan dan pengendalian aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
9. Pelaksanaan penyusunan identifikasi dan potensi kerja sama di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
10. Pelaksanaan pengoordinasian kerja sama teknis Pemerintah Daerah dengan instansi terkait di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, peningkatan Sumber Daya Aparatur serta sumber daya anggota Perlindungan Masyarakat; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

## Photo Kegiatan



## 2. Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

### Realisasi Kegiatan TP PKK Kecamatan Ciranjang

Tahun 2023

No	Kegiatan	Target	Realisasi	%
1	Pembinaan TP PKK Desa se-Kecamatan Ciranjang	9 Desa	9 Desa	100

Tim Penggerak PKK Kecamatan Ciranjang telah membudayakan Gerakan PKK dengan melaksanakan 10 Program Pokok PKK, hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 53 tahun 2000 tentang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ).

Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK tersebut, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pembinaan sampai fasilitasi, telah dilakukan oleh 4 Kelompok Kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

**1. Pokja I :**

- a. Bidang Penghayatan dan Pengamalan Pancasila;
- b. Bidang Gotong Royong.

**2. Pokja II :**

- a. Bidang Pendidikan dan Keterampilan;
- b. Bidang Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

**3. Pokja III :**

- a. Bidang Pangan;
- b. Bidang Sandang;
- c. Bidang Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga.

**4. Pokja IV :**

- a. Bidang Kesehatan;
- b. Bidang Kelestarian Lingkungan Hidup;
- c. Perencanaan Sehat

### Foto kegiatan



### 3. Kegiatan koordinasi pemeliharaan prasaana dan sarana pelayanan umum

Kegiatan ini adalah kegiatan baru di tahun 2023, kegiatan ini merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk meningkatkan kebersihan lingkungan. Dengan mempekerjakan masyarakat sekitar sebagai petugas kebersihan sebanyak 3 orang dan dilengkapi dengan perlengkapan kebersihan lainnya.



**Foto lokasi :**



**B. SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN CIRANJANG**

Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran PD	Target Tahun				Realisasi Tahun				Ket
		2020	2021	2022	2023	2020	2021	2022	2023	
Meningkatnya kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntable	Survey kepuasan Masyarkat (SKM) Kepada OPD Terkait	81,73	81,98	82,15	82,85	84,26	84,81	83,02	83,30	
	Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kepada Masyarakat	81,73	81,98	82,15	85,65	84,26	84,81	83,02	83,30	

### C. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari Satu sasaran dan dua Indikator Kinerja yang telah ditetapkan terdapat 5 program dengan capaian anggaran 95,54% yaitu :

**Tabel 3.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kualitas pelayanan public yang transparan dan akuntable	1. SKM kepada OPD Terkait	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100	100	0
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat	100	100	0
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	100	0
			Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	0
2		2.SKM kepada masyarakat	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100	100	0
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100	100	0
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	100	0

Berdasarkan table diatas, Kecamatan Ciranjang telah melakukan efisiensi anggaran 0% dari total belanja wajib.

## B. Realisasi Anggaran

**Tabel 3.4 Realisasi Kinerja dan Anggaran**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kinerja			Nama Program	Keuangan		
			Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%
1	Terwujudnya pelayanan kepada masyarakat yang optimal	Prosentase pemenuhan pelayanan kepada OPD terkait  Prosentase pemenuhan pelayanan kepada masyarakat	100	100	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.091.949.300	1.989.283.049	95,09
2						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	72.870.600	72.870.600	100
3						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	30.000.000	30.000.000	100
4						Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	13.575.000	13.575.000	100
5						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	60.525.000	60.525.000	100
6						Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34.367.500	34.367.500	100
<b>Total Anggaran</b>							<b>2.303.287.400</b>	<b>2.200.621.149</b>	<b>95,54</b>

## **B A B. IV**

### **PENUTUP**

Pelaporan kinerja merupakan salah satu komponen manajemen kinerja yang didalamnya menyajikan informasi mengenai keselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan kinerja. Dalam konsep manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan public, setiap PD melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Ciranjang tahun 2023 ini merupakan salahsatu bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik.

Di dalam LKIP ini dilakukan pengukuran kinerja yang didukung dengan data pendukung terkait pencapaian kinerja tahun 2023 dan dilengkapi dnegan pencapaian dari tahun ke tahun.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran IKU dapat dilihat bahwa Kecamatan Ciranjang berupaya optimal agar target kinerja dapat terealisasi sesuai dengan harapan.

Kami menyadari bahwa LKIP Kecamatan Ciranjang tahun 2023 ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan ini pada masa yang akan datang.

Namun kekurangan tersebut tidak menjadi halangan bagi Kecamatan Ciranjang untuk terus mengoptimalisasi target kinerja yang telah di tentukan, adapun salah satu upaya yang dilakukan adalah peningkatan kualitas SDM melalui pengoptimalisasi kinerja kecamatan yang lebih kreatif dan inovatif.